



PROSIDING

LOKAKARYA EMPAT PILAR KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

KAJIAN SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

URGENSI DAN RELEVANSI PEMBENTUKAN BADAN PENGKAJIAN
DAN PEMASYARAKATAN EMPAT PILAR KEHIDUPAN

Tim Penyunting:

Dr. Hufron, SH., MH.

Dr. Slamet Suhartono, SH., MH.

Dr. Endang Prasetyawati, SH., M.Hum.

Supriyadi, SH., MH.

Wiwik Alfiah, SH., M.Hum.

Gedung GRAHA WIDYA
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

PUSAT PENGKAJIAN MPR RI
2013

NILAI – NILAI LUHUR PANCASILA DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Oleh :
NANY SURYAWATI,SH.,MM.,MH

I. Pendahuluan

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang lahir dan berkembang dalam kemajemukan dan perbedaan yang dipersatukan oleh keinginan untuk hidup bersama dalam suatu negara dan bangsa yang merdeka dan berdaulat, melalui suatu perjuangan yang sangat panjang dan sangat sulit, akan tetapi dengan menngedepankan nilai-nilai luhur bangsa, dan ditetapkan menjadi Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia ini.

Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan ideologi, pandangan dan falsafah hidup yang harus dijadikan pedoman hidup dfari bangsa Indonesia dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Nilai-nilai luhur ini digali dari budaya bangsa dan memiliki nilai dasar yang diakui secara universal sehingga tidak lekang oleh perjalanan waktu, yang berarti tidak akan pernah berubah selama negara Indonesia masih berdiri.

Sila pertama mencerminkan kemajemukan bangsa Indonesia, melalui kehidupan keagamaan yang kuat dengan beralndaskan moral dalam kehidupan ketatanegaraannya, dan hal ini membuktikan bahwa bngsa Indonesia sejak dulu adlaah bangsa yang religius, sehingga dalam bernegara , bangsa Indonesia mempunyai pedoman hidup yang berke-Tuhan-an.

Sila kedua merupakan bentuk kesadaran dari bangsa Indonesia yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sesuai budaya bngsa Indonesia yang majemuk dan beragam.

Sila ketiga mencerminkan adanya kesadaran akan kemajemukan dan keberagaman bangsa Indonesia, yang tetap dipelihara dan dijaga keberadaannya dalam satu wadah yang satu, sehingga persatuan dalam perbedaan adalah hal yang sangat mendukung.

Sila keempat merupakan perwujudan kesadaran bangsa Indonesiaia untuk selalu mengutamakan kegotongroyongan dan musyawaraj di dalam mengambil sutau

keputusan, sehingga keragaman tetap dapat dipertahankan dalam satu kesatuan.

Sila kelima merupakan suatu cita-cita bangsa Indonesia untuk selalu mengutamakan prinsip-prinsip keadilan dalam mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur.

Dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara pada setiap jaman dan era kepemimpinan, mempengaruhi berkembangnya pola pikir generasi muda untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, akan tetapi dengan pengalaman dalam kehidupan politik di masa ini, generasi muda cenderung tidak peduli terhadap nilai-nilai luhur yang terdapat di dalam Pancasila, dan era globalisasi telah melahirkan suatu permasalahan yang sangat kompleks dalam seluruh dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Hal ini cukup memperhatikan karena dalam kehidupan bermasyarakat terjadi ketidakpedulian terhadap nilai-nilai luhur Pancasila, yang tidak dipahami secara mendalam sehingga memunculkan sikap individualis yang sangat jauh berbeda dengan nilai-nilai luhur Pancasila yang lebih mementingkan keseimbangan, kerjasama, saling menghormati, kesamaan derajat dalam hubungan manusia dengan manusia lainnya, seolah-olah Pancasila telah hialng dari memori kolektif bangsa, dan Pancasila hanya disandarkan di tembok atau dilorong sunyi justru ditengah hiruk pikuk demokrasi dan kebebasan berpolitik di Indonesia. Hal ini menunjukkan kealpaan bangsa Indonesia untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, (seolah-olah Pancasila telah kehilangan roh dan jiwa anak bangsanya) meskipun Pancasila sampai pada saat ini masih berdiri kokoh dalam mempersatukan keutuhan berbagai unsur dalam masyarakat, yang terdiri dari suku-suku bangsa, golongan dan etnik dibawah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); maka pemahaman tentang empat pilar wawasan kebangsaan dan juga kesadaran bernegara yang tidak mendalam merupakan ancaman dari dalam bagi keutuhan kesatuan Negara Republik Indonesia, padahal bila nilai-nilai luhur Pancasila ini dipahami secara mendalam akan merupakan kekuatan moral yang sangat besar dalam mempertahankan keutuhan bangsa dan Negara Indonesia; maka munculnya pemikiran untuk mengkaji lebih dalam melalui refleksi diri terhadap penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

II. Pancasila dan Kebhinnekaan

Permasalahan kebangsaan yang terjadi saat ini, terutama ketidakpedulian terhadap nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, antara lain : tidak adanya saling menghormati dalam keanekaragaman pada bangsa Indonesia, padahal sesungguhnya secara normative, Pancasila dengan nilai-nilai luhurnya tetap kokoh sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai cita bangsa dalam semangat persatuan dan kesatuan bangsa dalam kebhinnekaan. Seluruh unsur dalam bangsa harus proaktif untuk menciptakan , membina, mengembangkan dan memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa yang senantiasa terancam oleh bibit-bibit perpecahan. Primordialisme, SARA, ketidakadilan, korupsi dan kesenjangan sosial ekonomi secara bertahap harus segera diatasi dan dihilangkan karena mengandung unsur perpecahan terhadap cita bangsa dalam persatuan dan kesatuan bangsa, oleh karena itu solidaritas dan kohesivitas sistem politik Indonesia akan sangat membantu keberhasilan pemantapan nilai-nilai luhur Pancasila melalui pemantapan nilai-nilai empat pilar Kehidupan Berbangsa dengan menghidupkan kembali sikap dan budaya gotong royong, musyawarah untuk mencapai permufakatan sebagai ciri khas bangsa Indonesia.

Pemantapan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam kebhinnekaan, akan mengembalikan Pancasila sebagai pedoman dan cita-cita bangsa Indonesia, serta membangun kembali spirit nasionalisme, meneguhkan kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum, penghormatan HAM, penghapusan segala ketidakadilan dimasa lalu, dengan demikian integritas nasional tetap kokoh, sehingga menguatkan kemampuan bangsa dalam menjawab tantangan globalisasi. Nilai-nilai Pancasila diakui oleh para ahli ketatanegaraan, memiliki keunggulan yang setara dengan sosialisme, marxisme dan lain-lainnya, karena merupakan perpaduan yang unik antara moralitas agama dan naturalism iptek, antara sekularisme Barat dan religious Timur, oleh karena itu dalam mengembangkan budaya dan peradaban supaya lebih unggul, didasarkan pada nilai-nilai moral agama dan ilmu pengetahuan teknologi, tanpa memilah-milah nilai-nilai luhur Pancasila, agar supaya pemahaman terhadap nilai-nilai luhur Pancasila tetap merupakan satu kesatuan dalam kebhinnekaan.

III. GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI INDONESIA

Geopolitik bukanlah ilmu pengetahuan murni, akan tetapi merupakan multidisiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara ruang dan politik, antara territorial dan individu serta meletakkan semua permasalahan pada aspek geografi yang menimulkan suatu analsia tentang kondisi pada saat ini, dengan berpedoman pada wwasan nusantara melalui cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya, persatuan dan kesatuan wilayah yang dikaitkan dengan geostrategic Indonesia yaitu: merancang konsepsi pengembangan kekuatan nasional, memperhatikan kondisi dinamisi bangsa, menyelenggarakan kesejahteraan bangsa dan memperhatikan keamanan, menghilangkan halangan dan ancaman terhadap integritas bangsa dengan komprehensif integral, termasuk ancaman militer dalam spektrum bela Negara, dan yang terutama menghadapi ancaman non militer (ekonomi,politik,sosial, budaya dan sebagainya) dalam suatu perjuangan mengisi kemerdekaan melalui suatu pengabdian sesuai potensi serta menjunjung tinggi nama Indonesia di dunai Internasional dalam berbagai bidang, dan keseuamnya ini dapat dilakukan apabila telah dilakukan pemahaman yang mendalam akan nilai-nilai luhur Pancasila melalui pemahaman empat pilar kebangsaan sebagai wujud nyata dalam spektrum bela Negara tersebut diatas. Adanya perkembangan menipisnya rasa kebangsaan dan ketidakpedulain terhadap nilai-nilai luhur Pancasila, membutuhkan sosialisasi empat pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu: Pancasila, UUD RI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Pembangunan karakter bangsa sangat diperlukan agar jati diri dan identitas bnagsa serta nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa serta nasionalisme Indonesia tetap tampak dalam dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena tidak akan mungkin kultur kepribadian bangsa dapat dibangun bila tidak ada rasa kebangsaan yang mendalam dan mantap.

IV. PENJABARAN NILAI-NILAI PANCASILA

Terjadinya reformasi dalam penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam UUD RI 1945 melalui perubahan UUD RI 1945 yang berlangsung selama empat tahun (1999 - 2002), agar supaya nilai-nilai dan ide-ide yang terumuskan dalam Pancasila dan UUD RI 1845 sungguh-sungguh diwujudkan dalam praktik bernegara, yakni permuusan legislasi dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan operasionalnya serta impelemntasinya secara konsisten dan bertanggungjawab

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Era reformasi yang menggugah-dengungkan demokratisasi dan anti ototarianisme seharusnya tidak melantarkan Pancasila yang disandarkan pada suatu tembok saja, sebagai retorika atau hiasan belaka, tetapi benar-benar diamalkan dalam kehidupan sehari-hari; hal inilah yang menjadi momentum dalam pembuatan konsep "**Empat Pilar**" (**4-P**) yaitu : Pancasila, UUD RI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, yang harus segera disosialisasikan, akan tetapi berbeda dengan pemahaman Pancasila pada masa orde baru yang mengkampanyekan P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Sosialisasi 4-P ini dengan pembudayaan Pancasila beserta norma-norma derivatifnya yang utama, yang meliputi : (1) **Pancasila** sebagai dasar Negara dan ideologi nasional, (2) **Undang Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945**, (3) **NKRI** sebagai consensus bentuk Negara yang harus dipertahankan dan (4) **Bhinneka Tunggal Ika** sebagai kadijah hidup bersama dalam keberagaman yang harus diamalkan.

V. MASA DEPAN PANCASILA DAN NKRI

Kehidupan bermasyarakat yang terprovokasi dalam konflik ekonomi dan politik, harus segera dihentikan dan untuk itu diperlukan manajemen politik kenegaraan yang bertumpu pada *leadership* yang kuat secara moral untuk dapat menegakkan hukum seadil-adilnya, sedangkan manajemen politik ekonomi mengupayakan pembebasan rakyat dari kemiskinan dan memanfaatkan sumber daya alam bagi kesejahteraan rakyat, antara lain : mampu mencukupi kebutuhan pangan rakyat, mampu mengubah pembangunan skala prioritas ekonomi yang bertumpu pada pertumbuhan yang telah melahirkan kesenjangan, diubah melalui prioritas kebudayaan dengan focus pembangunan seutuhnya melalui pendidikan yang mencerdaskan, dan menetapkan dana pendidikan sebesar 20 % dari APBN secara efektif supaya kualitas manusia Indonesia semakin meningkat dan berkembang menjadi manusia pencipta pekerjaan yang dapat membebaskan masyarakat dari pengangguran dan kemiskinan. Untuk konteks keberagaman, diperlukan keberagaman agama yang dapat membangkitkan komitmen kemanusiaan dan kepedulian sosial yang tinggi, dan menjadi sumber kehidupan spiritual yang mencegah kejatuhan peradaban dan menciptakan keadilan serta kesejahteraan masyarakat.

Pancasila dan NKRI sebenarnya merupakan kesatuan ideologi dan praktek politik, dan Pancasila dijabarkan secara konkrit dan terukur dalam realitas

kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan makmur, sesuai cita-cita bangsa yang terkandung dalam Pancasila dan UUD RI 1945.

VI. PENUTUP

Menyadari pentingnya upaya sosialisasi nilai-nilai luhur Pancasila melalui internalisasi empat pilar bangsa pada diri setiap warga Negara di era globalisasi dan dengan memperhatikan wilayah geografis Indonesia, maka diperlukan suatu lembaga khusus dengan kewenangan khusus untuk melakukan kajian, pemasyarakatan, pendidikan dan pembudayaan 4-P ini secara sistematis, terstruktur dan massif ke segenap lapisan masyarakat, karena Pancasila adalah sumber pemersatu dan penguat kesatuan bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan hal ini menjadi tanggung jawab bersama anak bangsa (seluruh masyarakat Indonesia), bukan tanggung jawab pemerintah saja. Nilai-nilai luhur Pancasila khususnya sila ketiga "Persatuan Indonesia" harus dapat dipahami dan dimaknai sebagai semangat untuk memelihara keharmonisan dalam keberagaman bangsa Indonesia, demikian juga dengan lambang Negara berupa Burung Garuda dengan tulisan "Bhinneka Tunggal Ika", yang merupakan kebanggaan bangsa Indonesia di samping lagu Indonesia Raya dan bahasa persatuan Bahasa Indonesia.

Identitas bangsa ini tidak menghapus identitas lokal dari suku-suku bangsa yang ada di Indonesia akan tetapi semakin memperbesar kebanggaan bangsa Indonesia, karena masing-masing suku memiliki rasa, identitas dan budaya sendiri-sendiri, dan justru hal inilah yang perlu dikembangkan bertumpu pada pilar ke empat : Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian pula potensi-potensi konflik harus segera dipadamkan agar pembangunan karakter dan kualitas bangsa dapat berjalan secara efektif, konsisten dan dalam suasana yang kondusif tanpa ada gangguan terhadap kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia dalam wadah NKRI.

Usaha untuk membumikan nilai-nilai luhur Pancasila ini sebaiknya dilakukan dengan pendekatan horizontal dan ilmiah, melalui pendidikan karakter dari berbagai aspek antara lain : moral, kewarganegaraan (*civic education*) dan pengembangan karakter bangsa, melalui keteladanan serta pengetahuan tentang prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam Pancasila, dan bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap nilai-nilai luhur Pancasila ini harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Indonesia.